



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ENDAH DWI DINYASTUTI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 134060

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	2.950.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 2.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 617 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 450.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	88.000.000
1. MOBIL, MIRAGE MOBIL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	37.800.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	155.000.000
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	8.235.608
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	3.000.000
Sub Total	Rp.	3.242.035.608
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	273.145.058
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	2.968.890.550

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.